BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan di Kota Solok, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok telah menjalankan perannya secara aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peranan ini dilakukan dengan mengacu pada Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022, yang mencakup berbagai tahapan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok dalam menangani Kasus Kekerasan di Kota Solok menghadapi berbagai kendala, yaitu:
 - a. Belum Adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA: Ketiadaan UPTD PPA menyebabkan tumpang tindih tugas di DPMPPA, mengurangi efisiensi layanan perlindungan.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kekurangan tenaga ahli, seperti psikolog klinis dan konselor, membatasi kemampuan DPMPPA dalam memberikan layanan yang cepat dan berkualitas, terutama pada kasus yang membutuhkan pendampingan intensif.
 - c. Ketakutan Korban untuk Melapor: Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau ketakutan terhadap dampak pelaporan, seperti ancaman keamanan dan tekanan keluarga.

- d. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran menghambat penyediaan fasilitas perlindungan permanen, pelatihan SDM, serta program pemberdayaan masyarakat, yang berdampak langsung pada kualitas layanan.
 - e. Norma dan Budaya Masyarakat: Nilai budaya yang menyalahkan korban dan mengutamakan kehormatan keluarga sering kali menghalangi pelaporan kasus kekerasan, terutama pada kekerasan seksual dan KDRT.
3. Meskipun menghadapi berbagai kendala, DPMPPA telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu:
- a. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama intensif dengan UPPA Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Barat (UINSB), dan Dukcapil.
 - b. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi: Melalui edukasi berbasis komunitas, penyuluhan di sekolah, dan penyebaran informasi melalui media, DPMPPA meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan dan hak-hak perempuan dan anak.
 - c. Pendampingan Sesuai Kebutuhan Korban: Layanan diberikan secara komprehensif, meliputi bantuan hukum, layanan medis, layanan psikologis, serta rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu korban mencapai kemandirian.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Solok, yaitu:

1. Pemerintah Kota Solok perlu segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai amanat Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2020 untuk memastikan layanan perlindungan berjalan secara terorganisasi dan efektif.

2. Penyediaan fasilitas perlindungan permanen, seperti rumah aman, sangat diperlukan untuk memberikan tempat yang layak dan mendukung pemulihan korban kekerasan.
3. Penambahan tenaga ahli, seperti psikolog klinis dan konselor hukum, serta pelatihan berkala bagi tenaga pendamping di DPMPPA harus dilakukan agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.
4. Peningkatan edukasi masyarakat melalui sosialisasi di sekolah dan komunitas lokal penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong korban untuk melapor.
5. Optimalisasi koordinasi lintas sektor antara DPMPPA, UPPA Polres, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan layanan perlindungan dapat diberikan secara terpadu dan komprehensif.